**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Buku teks merupakan sumber dan media pembelajaran yang disusun sebagai implementasi kurikulum. Buku ini diregularisasi oleh negara. Karena itu, seluruh muatan buku teks, mulai materi sampai bahasa, diarahkan sesuai kurikulum yang telah disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan negara. Kepentingan tersebut seperti kondisi negara yang saat ini sedang terlibat dalam forum perdagangan dan kerjasama ekonomi global (MEA, APEC, AFTA) dan perdagangan bebas (Pemaparan Wamendikbud dalam Sosialisasi Kurikulum 2013, tahun 2012). Ini membuat wacana-wacana pada buku teks sarat dengan muatan-muatan atau makna eksplisit maupun implisit yang berorientasi pada kebijakan-kebijakan negara. Buku Siswa Elektronik (BSE) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia sebagai buku produk negara, baik pada buku terbitan tahun 2014 maupun buku revisi terbitan tahun 2015 patut diduga memuat hal tersebut.

Pada observasi awal, peneliti menemukan bahwa buku teks K13 diarahkan pada wacana-wacana terkait dengan persiapan sumber daya manusia yang siap saing pada pasar bebas global. Wacana terkait kewirausahaan, konsep warga negara internasional yang baik, dan prosedur pengurusan visa dan paspor merupakan contoh wacana yang mengarah pada kebijakan atau kondisi aktual negara, seperti yang peneliti sebut sebelumnya. Secara ontologis, salah satu data dan analisisnya dilampirkan sebagai berikut ini.

“Melihat potensi yang demikian besar ini...para investor asing mengharapkan makin banyak pilihan investasi di Indonesia. Harapan para investor tersebut tentu merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia... (halaman 73, Bab Kebebasan Berpendapat pada Forum Internasional).”

Analisis sederhana yang dilakukan oleh peneliti melihat bahwa kalimat-kalimat Buku Sekolah Elektronik (BSE) Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 halaman 73 tersebut berupaya menghadirkan persepsi bahwa investasi pihak asing bernilai positif. Kata, ‘peluang’ dan ‘tantangan’ lebih merujuk pada nilai positif dibanding nilai negatif. Peluang jika disia-siakan akan merugikan, sementara tantangan jika tidak dipenuhi akan mengesankan kelemahan atau Indonesia tidak melatih kemampuannya, dalam hal ini bersaing dengan pihak asing. Kenyataannya, investasi pihak asing atau swasta memang merupakan konsekuensi dari keterlibatan dalam pasar bebas global dalam forum MEA, AFTA, dan lain-lain. Oleh karena itu, wacana pada buku teks ini, menurut peneliti, merupakan penggiringan atau pengarahan agar kebijakan keterlibatan dalam pasar global diterima atau didukung dan dilihat sebagai sesuatu yang bernilai positif secara total. Dugaan pengarahan pun menjadi semakin patut dengan fakta bahwa buku teks yang memuat wacana-wacana ini merupakan terbitan kementerian yang membidangi pendidikan nasional.

Wacana (teks) dalam buku teks sebagaimana hakikat wacana, memang merupakan bentukan suatu praksis sosial atau praktik diskursus (Fairclough, 2003: 25). Gambaran atau pesan yang hadir dalam wacana merupakan pemuatan realitas sosial dan berdasarkan pada kehendak pewacana, sehingga pemuatan kepentingan-kepentingan dalam wacana merupakan kelaziman. Maksud tersembunyi dari pewacana tersebut bisa saja terdapat di balik kosakata atau bahasa dari pesan yang disampaikan. Sebagai diskursus sosial, pewacana dan wacana yang diciptakan dapat terpengaruhi oleh keadaan atau sesuatu yang lebih besar dari diri Si Pewacana, seperti yang terjadi dalam buku teks yang menjadi objek penelitian peneliti. Buku teks dan wacana-wacana buku ini terpengaruhi atau ditentukan oleh negara.

 Wacana buku teks yang diarahkan oleh penyusun buku sesuai dengan kehendak atau kepentingan negara sebagai pengatur arah pendidikan Indonesia tersebut. Ini menunjukan bahwa bahasa memang merupakan alat kekuasaan. Sementara itu, bahasa yang menjadi alat pelaksana kekuasaan dan dominasi--termasuk dalam wacana buku teks--tidak jarang berujung pada praktik kekerasan. Hal ini karena bahasa memang memiliki peran sentral dalam mekanisme kekuasaan dan dominasi, sehingga lahirlah kekerasan, terutama dalam menyembunyikan maksud dari sebuah tindakan yang dilatarbelakangi oleh unsur kekuasaan (Bourdieu, 1991: 170). Kekerasan yang terlahir dari penyembunyian maksud sebenarnya, seperti pengarahan yang dilakukan negara dalam wacana-wacana buku teks tersebut, disebut kekerasan simbolik—kekerasan yang tidak tampak dan tidak disadari oleh korban, bahkan dianggap wajar.

Kekerasan simbolik dalam buku teks terjadi karena instrumen simbolik, seperti bahasa dan turunannya (teks) memang rentan disalahkenali karena memiliki elastisitas dan fleksibilitas makna. Terlebih, apabila arena (*field*) linguistik sebagai tempat terjadinya segala kehidupan sosial dengan segala aturan yang boleh dan yang tidak boleh dikuasai oleh pemilik modal besar, seperti negara dan penyusun buku. Segala habitus (kebiasaan, gaya hidup, sikap) yang diwacanakan akan diterima begitu saja oleh pembaca karena disalahkenali bahwa wacana tersebut sudah sepatutnya. Pembaca yang notabene adalah pihak terdominasi bahkan berusaha sekeras mungkin untuk melakukan atau menerima habitus kelas atas yang diwacanakan tersebut. Kekerasan simbolik seperti ini, dalam buku teks sumber data peneliti wujudnya ditemukan sebagai dampak dari wacana-wacana yang berorientasi pada globalisasi dan pasar bebas.

Seperti yang telah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya, wacana di dalam buku teks yang bertemakan globalisasi dan pasar bebas, baik ide atau pesan, maupun bahasa (kalimat dan kosakata) menyiratkan ketidakadilan dalam keberpihakan kelas yang terlihat dari penggunaan kosakata dan pengangkatan ide atau pesan. Globalisasi dan pasar bebas selalu menujukkan perilaku-perilaku (habitus) kelas atas (borjuis/kaum dominan) dan masyarakat kota sebagai pusat pasar. Inilah yang peneliti temukan dalam wacana-wacana buku teks pada saat pelaksanaan observasi awal. Secara ontologis, data tersebut kembali disajikan sebagai berikut ini.

 “(10.b) HP Baru

Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk Ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada Ayahnya, Rani pun minta bantuan ibunya. Namun, tetap saja usaha Rani gagal Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan Ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. “Yah ... Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya Yah?” kata Rani pada Ayahnya. “Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagipula kan sudah ada telepon rumah,” kata Ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. “Tapi, Yah ... semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat.” “Lha kalau begitu kamu jangan pulang telat,” kata Ayah lagi. Rani hampir saja menangis. “Tak hanya itu, Yah ... Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, ngirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah,” kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas.”

Analisis peneliti berpendapat bahwa wacana buku teks tersebut dinilai sebagai praktik kekerasan simbolik karena hanya memuat habitus kelas atas. Ini terkait dengan habitus (perilaku, kebiasaan, kepemilikan benda) dalam istilah Bourdieu. Kepemilikan HP terlebih yang berfitur internet hanya mudah diakses oleh siswa-siswa menengah ke atas. Jika kita mengingat bahwa buku teks ini berorientasi pada globalisasi dan pasar bebas, maka dapat dipahami jika dampak dari orientasi ini adalah pengguna buku teks dari kalangan kelas bawah akan merasa iri atau akan terhegemoni atas wacana ini. Karena itu, wacana ini dapat dikatakan sebagai wacana yang memuat kekerasan simbolik.

Analisis peneliti atas data yang dikutip tersebut, arena (*field*), tempat hidup Si Penyusun buku sebagai penentu wacana yang termuat (penguasa modal) adalah kota yang habitusnya dekat dengan habitus kelas dominan. Terlebih, pemerintah (negara) sebagai penentu arah pendidikan, penguasa seluruh modal dan kekuasaannya lebih besar dari penyusun buku, saat ini memang mengarahkan pendidikan untuk menghadapi globalisasi dan pasar bebas yang dampaknya telah disebutkan. Maka habitus kelas ataslah yang termuat. Sementara itu, wacana tersebut bermuatan perintah untuk melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar sebagai bahan untuk membuat laporan teks observasi yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki sebagai produk pembelajaran. Tentu perintah ini akan diikuti oleh pengguna buku teks demi suksesi pembelajaran. Inilah bentuk kekerasan simbolik.

Kehadiran kekerasan simbolik dalam buku teks juga diungkapkan oleh Nanang Martono dalam penelitian yang kini telah dibukukan berjudul *Kekerasan Simbolik di Sekolah* (2012). Martono mengungkapkan bahwa kekerasan simbolik dalam buku teks berwujud kosakata yang menunjukkan kesenjangan antara kelas sosial borjuis dan proletar, serta penyampaian ide atau gagasan yang menggiring pembaca, dalam hal ini siswa sebagai pengguna buku teks, untuk menyepakati gagasan pewacana yang berpihak pada kelas sosial dominan atau borjuis (Martono, 2012: 48). Penelitian kekerasan simbolik dalam buku teks yang dilakukan oleh Nanang Martono juga menunjukkan bahwa buku teks di sekolah-sekolah Indonesia memuat kekerasan simbolik yang pelaku kekerasan tersebut bahkan juga tidak menyadari perbuatan kekerasan. Selain itu, hasil penelitian Martono juga memaparkan bahwa 35,5% buku teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia merupakan pemuat kekerasan simbolik. Angka ini adalah angka tertinggi dibandingkan dengan buku teks mata pelajaran lain yang juga diteliti oleh Nanang Martono (2012: 50 ).

Kurikulum 2013, terkhusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang bermuatan materi berbasis teks, membuat potensi pemuatan kekerasan simbolik menjadi lebih besar, lebih dari angka 35,5% yang ditemukan oleh Martono. Hal ini ditambah lagi dengan realita hidup bernegara Indonesia yang sedang melibatkan diri pada perdagangan bebas era globalisasi. Perdagangan bebas yang berpusat pada ibu kota atau kota-kota besar provinsi yang identik dengan habitus kelas borjuis, membuat kepatutdugaan bahwa potensi keberpihakan wacana buku teks pada habitus-habitus masyarakat kota dan meminggirkan habitus masyarakat desa (pinggiran) akan lebih besar. Sekali lagi, hal ini telah ditemukan oleh peneliti dalam kegiatan observasi awal.

Hal yang memiriskan dari pemuatan wacana-wacana sarat kekerasan simbolik adalah penyimpangan pelaksanaan pendidikan dari cita-cita luhur. Kekerasan simbolik yang dilakukan dengan objek tidak sadar, bahkan sering juga subjek (pelaku) pun demikian, merupakan bentuk dehumanisasi yang tentu bertentangan dengan hakikat pendidikan pemanusiaan manusia, seperti pernyataan bahwa manusia meyakini bahwa terdapat cara hidup sangat berharga di dalam kehidupan yang harus diwariskan melalui pendidikan (Thut & Adams, 2005: 16). Begitu juga dengan pernyataan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, yang menyebutkan pendidikan adalah sarana untuk memerdekakan manusia atau untuk mencapai kesempuranaan manusia (Dewantara, 2009: 18). Selain itu, pelaksanaan yang bermuatan kekerasan simbolik ini pun menyimpang dari tujuan pendidikan yang dimuat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Oleh karena itu, kontrol atau pengawasan terhadap kebermuatan wacana-wacana kekerasan simbolik dalam buku teks bahasa Indonesia harus dihadirkan. Penelitian ini adalah salah satu wujud pengawasan tersebut.

Selain sebagai bentuk dehumanisasi yang menyimpang dari hakikat pendidikan dan tujuan pendidikan nasional, hal lain yang mendasari pemilihan kekerasan simbolik sebagai masalah yang akan diteliti adalah naluri kekuasaan yang menjadi penyebab lahirnya kekerasan simbolik terdapat di dalam diri semua manusia, hanya saja memang seringkali tidak disadari seperti yang diungkapkan Nietzsche. Naluri yang ada di semua manusia ini berarti membuat potensi kekerasan simbolik, sebuah tindak dehumanisasi, semakin besar. Karena itu, bahaya laten ini harus dikuak seperti yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, orientasi pendidikan era kini dan oreintasi Kurikulum 2013 kepada globalisasi dan pasar bebas yang dampaknya telah disampaikan di paragraf sebelumnya juga menjadi alasan pemilihan masalah ini.

Selain Martono, penelitian lain yang juga pernah dilakukan terkait kekerasan simbolik adalah “Pertarungan Simbolik Dalam Wacana Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) oleh Jazery, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah STAIN Tulungagung (2009)*”*. Penelitaian tersebut menemukan bahwa wacana Bantuan Khusus Mahasiswa adalah wacana yang memuat kekerasn simbolik oleh pemerintah untuk membungkam mahasiswa yang mempotes kebijakan kenaikan BBM. Penelitian lainnya berjudul “Kuasa Simbolik Menurut Pierre Bourdieu (Telaah Filosofis)” pada Fakultas Ilmu Pendidikan Budaya Universitas Indonesia oleh Dwizatmiko (2010) yang hasilnya menekankan bahwa kekerasan simbolik dititikberatkan pada ketidaksadaran korban, bukan ketidaksadaran pelaku. Demikian pula pada penelitian Taufiqurrahman yang berjudul “Sekolah Elit sebagai Reproduksi Kesenjangan Sosial” pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penggunaan metode analisis wacana kritis dalam menganalisis relasi bahasa dan kekuasaan simbolik yang melahirkan kekerasan simbolik berdasarkan teori Pierre Boudieu dalam buku *Language and Symbolic Power* (1991). Metode analisis wacana kritis ini dipilih karena menelaah kata hingga wacana dari isi buku teks dengan memerhatikan betul konteks sosial penggunaan bahasa, sehingga selisik atas kekerasan simbolik dilakukan lebih ketat. Selain sebagai pengawasan atas praktik kekerasan simbolik dalam buku teks yang merupakan wujud dehumanisasi dan bertentangan dengan cita-cita luhur pendidikan, penelitian ini juga dihadirkan untuk memeroleh pemahaman mendalam terhadap praktik analisis wacana kritis dalam pengungkapan masalah sosial-masalah sosial yang tersembunyi di dalam teks. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk penyusunan Kurikulum Nasional 2018 yang kini mulai berlangsung.

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengacu pada relasi bahasa dan kekuasaan simbolik yang melahirkan kekerasan simbolik di dalam wacana-wacana, terkhusus buku teks mata pelajaran bahasa Indoensia. Rumusan masalah tersebut dirincikan sebagai berikut ini.

1. Bagaimanakah bentuk kekerasan simbolik yang diwujudkan dalam buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme kekerasan simbolik dalam buku teks mata pelajaran bahasa Indonesia?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut ini.

1. Mendeskripsikan perwujudan kekuasaan simbolik yang diwujudkan dalam buku teks Bahasa Indoneisa melalui penggunaan bahasa, mulai kosakata sampai wacana.
2. Mendeskripsikan mekanisme kekerasan simbolik dalam buku teks mata pelajaran Bahasa Indonesia.
3. **Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan hakikat dan cita-cita luhur.

1. Manfaat Teoretis
2. Menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat menambah informasi mengenai analisis wacana kritis pada buku teks.
3. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait kekerasan yang tidak disadari oleh subjek dan objek terkait praksis kebahasaan yang berelasi dengan kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu.
4. Manfaat Praktis
5. Menjadi bahan acuan atau bahan pertimbangan dalam penyusunan buku teks mata pelajaran.
6. Menjadi referensi dan bahan ajar bagi pihak pengajar bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas maupun di Perguruan Tinggi.
7. Menjadi referensi bagi mahasiswa untuk mendalami dan mengkaji relasi bahasa dan kekuasaan simbolik yang menciptakan praktik kekerasan simbolik dalam wacana.
8. Menjadi rujukan dan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan meneliti hal serupa.